

## **ANALISIS DAYA SAING DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA USAHATANI CABE MERAH (KASUS KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG DAN KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

**Netti Tinaprilla**

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

### **ABSTRACT**

This paper aims to analyze (1) profitability of chili farming privately and socially; (2) competitiveness of chili through competitive and comparative advantages; (3) impacts of government policy on chili farming; (4) impacts of the government policy change on the competitiveness of chili. This research was conducted in Ciwidey sub-district, Bandung district and Lembang sub-district, Bandung Barat district. Both primary and secondary data were used in this research whereas the samples were chosen by snowball sampling method. Policy Analysis Matrix (PAM) was employed in this paper. The survey was conducted from December 2007 to February 2008. The results showed that chili farming in both sub-districts was profitable privately and socially. Chili farming in Lembang was more profitable than in Ciwidey. Both sub-districts have competitive and comparative advantages where the competitive and comparative advantages in Ciwidey were higher. Impacts of output policy have caused the chili farming in both sub-districts received actual output price lower than its social price. Subsidy of tradable and non-tradable inputs caused farmers received cheaper input price. Government policy on input-output has benefited chili farming in Lembang. Increase of production cost, decrease of output price and decrease of production partially or as a whole have caused smaller profitability and higher PCR and DRC that are nearly to one. However, these changes would not change the profit to be the loss or competitive and comparative advantages to be not competitive.

*Keywords : farming, competitiveness, comparative advantage, competitive advantage, policy*

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Sektor pertanian dirasakan semakin penting perannya dalam pembentukan PDRB, termasuk di Kabupaten Bandung. Subsektor utama dalam pembentukan PDRB pertanian di Kabupaten Bandung adalah tanaman pangan dan hortikultura dimana pertumbuhannya berasal dari komoditas palawija dan sayuran (Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2006). Pertumbuhan komoditas sayuran sebesar 0,17 persen masih relatif lebih rendah dari komoditas palawija sebesar 3,11 persen seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Pertumbuhan sayuran memang lebih rendah dari komoditas palawija, tetapi sayuran memiliki peluang karena Kabupaten Bandung memiliki sentra produksi sayuran yang luas dan

kesesuaian agroklimat. Berdasarkan keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan beberapa sayuran sebagai komoditas unggulan yaitu kentang, kubis, tomat, cabe merah dan bawang merah (Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2005).

Cabe merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang memiliki angka pertumbuhan produksi tertinggi dibanding komoditas sayuran unggulan lainnya. Rata-rata pertumbuhan produksi cabe merah dari tahun 2001 sampai 2005 adalah 10,18 persen. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Bandung (2005) beberapa kecamatan sentra produksi meliputi:

Tabel 1. Pertumbuhan Produksi Beberapa Komoditas Pertanian di Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005 (dalam ton)

Jenis Komoditas	Tahun					Pertumbuhan (%)
	2001	2002	2003	2004	2005	
<b>1. Padi</b>						
- Padi Sawah	690.180	571.908	577.619	618.030	629.841	- 1,21
- Padi Gogo	42.101	38.591	37.446	37.191	31.225	-6,21
<b>Jumlah</b>	<b>732.281</b>	<b>610.499</b>	<b>615.065</b>	<b>655.221</b>	<b>661.066</b>	<b>-1,49</b>
<b>2. Palawija</b>						
- Jagung	80.714	63.548	69.870	82.119	85.076	3,58
- Kedelai	1.572	570	896	1.116	819	-9,65
- Ketela Pohon	145.478	143.671	122.011	139.469	183.462	4,89
- Ketela Rambat	39.078	30.703	32.925	30.434	31.125	-4,92
- Kacang Tanah	3.753	3.493	3.866	2.996	3.304	-4,01
- Kacang Hijau	89	63	307	384	144	21,83
<b>Jumlah</b>	<b>720.684</b>	<b>242.048</b>	<b>229.875</b>	<b>256.518</b>	<b>303.930</b>	<b>3,11</b>
<b>3. Sayuran</b>						
- Kentang	283.328	258.362	245.280	261.388	257.116	-1,89
- Kubis	330.515	278.917	266.271	221.658	346.788	0,85
- Tomat	81.851	63.681	119.702	91.884	90.306	5,04
- Bawang Merah	34.611	24.184	55.792	40.516	35.787	4,89
- Cabe Merah	15.435	12.562	40.387	18.433	23.776	10,18
<b>Jumlah</b>	<b>745.758</b>	<b>637.706</b>	<b>727.432</b>	<b>633.906</b>	<b>753.773</b>	<b>0,17</b>

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2006.

Kecamatan Pangalengan, Kertasari, Lembang, Cimenyan, Cilengkrang, Pacet, Cisarua, Pasir Jambu, Ciwidey, Ngamprah, Parompong, lembang, Cikalongwetan, Ibut, Cimaung, Cikancung, Cililin, Arjasari, Batujajar dan Rancabali dengan luas potensi lahan pada tahun 2005 seluas 16.481 hektar.

Pengembangan sayuran unggulan perlu diarahkan melalui sistem kemitraan yang saling menguntungkan, dan berorientasi pasar dengan menekankan pada mutu produk. Hal tersebut harus dilakukan untuk mengantisipasi pasar yang semakin kompetitif, kemudian dengan semakin terbatasnya lahan subur akibat konversi serta semakin tingginya biaya produksi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, maka orientasi sistem produksi harus dikembangkan ke arah peningkatan daya saing, penerapan teknologi tepat guna serta efisien dalam pemanfaatan sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Mekanisme pasar memang akan mendorong suatu daerah ke arah sektor dimana daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif. Akan tetapi mekanisme pasar seringkali bergerak lambat dalam mengubah struktur ekonomi suatu daerah, sehingga untuk meningkatkan keunggulan komparatif suatu daerah perlu didukung oleh intervensi para penentu kebijakan sebagai pendorong perubahan struktur perekonomian daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Kabupaten Bandung saat ini telah mengalami pemekaran wilayah. Hal ini berdampak pada penurunan sektor pertanian di daerah tersebut. Rata-rata penurunan nilai produksi sektor pertanian di Kabupaten Bandung pasca pemekaran secara keseluruhan rata-rata sebesar 20 persen. Komoditas sayuran mengalami penurunan paling rendah. Hal ini

disebabkan karena wilayah utara setelah pemekaran tergabung ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung masih memiliki wilayah sentra sayuran di wilayah selatan seperti Ciwidey (Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2005). Terbentuknya Kabupaten Bandung Barat, secara ekonomi akan menambah kabupaten pesaing bagi Kabupaten Bandung dalam menghasilkan komoditas sayuran, sehingga komoditas sayuran yang berasal dari Kabupaten Bandung akan menghadapi tantangan. Tantangan tersebut terutama muncul di pasar regional dalam menghadapi komoditas sayuran yang dihasilkan Kabupaten Bandung Barat, hal tersebut terjadi karena komoditas sayuran yang dihasilkan oleh kedua daerah tersebut memiliki pasar tujuan yang sama yaitu pasar-pasar di sekitar Kota Bandung dan Ibu Kota Jakarta. Dengan demikian keuntungan dan daya saing yang tinggi harus menjadi karakter strategis dari komoditas sayuran yang dihasilkan kedua kabupaten, dimana daya saing dapat diciptakan melalui peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas usaha yang ditunjang dengan efisiensi pemasaran.

Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing komoditas sayuran unggulan tersebut tergantung dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah itu sendiri. Pemahaman yang akurat dan lengkap akan potensi daya saing suatu komoditas sayuran pada akhirnya akan berdampak pada rumusan implementasi kebijakan pemerintah daerah yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi keberlanjutan usaha pertanian pada umumnya dan komoditas sayuran unggulan pada khususnya. Salah satu fokus kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan pendapatan daerah (PAD) melalui tiap sumber dan peluang

yang mungkin, melalui pajak, retribusi serta pungutan lainnya, termasuk di sektor pertanian. Peraturan dan pungutan yang tumpang tindih antar daerah tentunya dapat mengakibatkan biaya perdagangan menjadi tinggi, sehingga konsumen harus membayar mahal. Pungutan-pungutan ini dapat menambah biaya perdagangan antar wilayah.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar dengan pemekaran wilayah akan memberikan keuntungan bagi setiap daerah, yang dilandasi bahwa pengambil keputusan merasa lebih yakin dalam memahami kondisi daerahnya. Selain itu benarkah dengan pengelolaan wilayah yang lebih kecil pemerintah daerah akan lebih mampu meningkatkan daya saing melalui langkah alokasi sumberdaya secara lebih efisien, pemanfaatan potensi daerah secara lebih terarah dan peningkatan kualitas infrastruktur sesuai dengan posisinya sebagai kabupaten.

Pemekaran wilayah sudah semestinya dapat diisi melalui rumusan dan implementasi kebijakan yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan usahatani komoditas pertanian, khususnya sayuran unggulan seperti cabe merah. Untuk itu, diperlukan informasi sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah tentang bagaimana kondisi usahatani cabe merah di daerahnya masing-masing setelah pemekaran. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk mengetahui tingkat daya saing dan kebijakan pemerintah pada usahatani cabe merah di Kabupaten Bandung dan di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana daya saing dan kebijakan pemerintah terhadap usahatani cabe merah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

### 3. TUJUAN

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat daya saing dan kebijakan pemerintah terhadap usahatani cabe merah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis tingkat keuntungan usahatani cabe merah secara finansial dan ekonomi di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung dan Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
2. Menganalisis daya saing usahatani cabe merah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat melalui keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.
3. Menganalisis dampak kebijakan pemerintah pada usahatani cabe merah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
4. Menganalisis dampak perubahan kebijakan pemerintah terhadap daya saing usahatani cabe merah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

### TINJAUAN PUSTAKA

Daya saing merupakan kemampuan produsen memproduksi dengan mutu yang baik dan biaya rendah sehingga pada harga-harga yang terjadi di pasar internasional dapat diproduksi dan dipasarkan oleh produsen dengan memperoleh laba yang mencukupi sehingga dapat mempertahankan kelanjutan usahanya (Simanjuntak *dalam* Novianti, 2003). Pendekatan yang sering digunakan adalah tingkat keuntungan dan efisiensi. Keuntungan dilihat dari dua sisi yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Sementara itu, efisiensi

dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan kompetitif dan komparatif.

Kajian mengenai daya saing berawal dari pemikiran Adam Smith mengenai konsep “spesialisasi” dan “perdagangan bebas” melalui teori keunggulan absolut (*absolute advantage*). Selanjutnya pada tahun 1817 David Ricardo melalui bukunya “*Principles of Political Economy and Taxation*” memperluas teori keunggulan absolut Adam Smith menjadi teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) (Salvatore, 1997). Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tapi juga penting dalam ekonomi regional. Sedangkan model Heckscher-ohlin (H-O) menekankan pada keseimbangan perdagangan antara dua kutub ekonomi *neoclassic*. Ide dasar model H-O adalah wilayah yang mempunyai tenaga kerja melimpah, secara relatif akan memanfaatkan kemampuan dirinya untuk memproduksi barang dengan faktor produksi padat karya yang relatif lebih murah. Dengan demikian, wilayah tersebut akan mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi barang tersebut (Salvatore, 1997).

Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang ditunjukkan oleh suatu negara atau daerah dalam daya saing produk yang dihasilkan dibandingkan dengan negara atau daerah lain. Keunggulan kompetitif merupakan perluasan konsep keunggulan komparatif dari Michael Porter sebagai kesuksesan suatu perusahaan dalam beroperasi pasar. Keunggulan kompetitif adalah alat untuk mengukur daya saing komoditi suatu wilayah dengan wilayah lain. Keunggulan ini dihitung berdasarkan harga pasar, dan nilai uang yang berlaku atau berdasarkan analisis finansial sehingga bukan merupakan konsep yang menggantikan konsep keunggulan komparatif, tetapi saling melengkapi (Prihartanti, 2005).

Porter dalam bukunya *The Competitive Advantage of Nation* (1990), mengemukakan tidak adanya korelasi langsung antar dua faktor produksi (sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang murah) yang dimiliki suatu negara, yang dimanfaatkan sebagai keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional. Porter mengembangkan **model berlian**, yang menerangkan bahwa suatu negara secara internasional dapat meraih keunggulan kompetitif, apabila dipenuhi empat syarat yang saling terkait dan membentuk **empat titik sudut** dari poin yang dinamakan bangunan intan yaitu : (a) keadaan faktor produksi, seperti tenaga kerja terampil atau prasarana, (b) keadaan permintaan dan tuntutan mutu di dalam negeri untuk hasil industri tertentu, (c) eksistensi industri terkait dan pendukung yang kompetitif secara internasional, (d) strategi perusahaan itu sendiri, dan struktur serta sistem persaingan antar perusahaan.

Kebijakan pemerintah diharapkan meningkatkan daya saing komoditas pertanian

termasuk sayuran baik di pasar regional, domestik maupun pasar internasional. Kebijakan pemerintah ditujukan untuk peningkatan ekspor atau melindungi produk dalam negeri. Kebijakan pemerintah diberlakukan terhadap input dan output yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga antara harga input dan output yang diterima produsen dengan harga yang sebenarnya terjadi jika dalam kondisi persaingan sempurna. Pengaruh intervensi pemerintah pada harga output diterangkan oleh **Monke and Pearson** (1989) yang membagi ke dalam **delapan tipe kebijakan subsidi dan dua tipe kebijakan perdagangan**. Klasifikasi dari kebijakan harga komoditas dapat dijelaskan pada Tabel 2.

Komoditas sayuran memiliki karakteristik khas yang mengakibatkan memiliki risiko tinggi dari aspek budidaya maupun dari pemasaran. Agustian *et. al* (2005) mengemukakan 4 permasalahan yang sering dihadapi petani dalam mengembangkan usahatani sayuran, yaitu pertama: sayuran relatif cepat busuk.

**Tabel 2. Klasifikasi Kebijakan Harga Komoditas**

Instrumen	Dampak Pada Produsen	Dampak Pada Konsumen
<b>Kebijakan Subsidi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengubah harga pasar dalam negeri</li> <li>• Mengubah harga pasar dalam negeri</li> </ul>	<b>Subsidi pada produsen (4 kebijakan)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada barang-barang substitusi impor (S+PI; S-PI)</li> <li>• Pada barang-barang orientasi ekspor (S+PE; S-PE)</li> </ul>	<b>Subsidi Pada Konsumen (4 kebijakan)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada barang-barang substitusi impor (S+CI; S-CI)</li> <li>• Pada barang-barang orientasi ekspor (S+CE; S-CE)</li> </ul>
<b>Kebijakan perdagangan (mengubah harga pasar dalam negeri)</b>	Hambatan pada barang impor (TPI)	Hambatan pada barang ekspor (TCE)

Sumber: Monke and Pearson, 1989.

Keterangan:

- S + = Subsidi
- S - = Pajak
- PE = Produsen Barang Orientasi ekspor
- PI = Produsen Barang Substitusi Impor
- CE = Konsumen Barang Orientasi Ekspor
- CI = Konsumen Barang Substitusi Impor
- TCE = Hambatan Barang Ekspor
- TPI = Hambatan Barang Impor

Kedua, petani umumnya menggunakan pestisida secara intensif untuk menekan resiko produksi. Konsekuensinya adalah residu pestisida pada komoditas sayuran relatif tinggi, dan menjadi penghambat ekspor sayuran. Ketiga, petani umumnya tidak berorientasi pasar tetapi orientasi produksi. Keempat adalah fluktuasi harga. Oleh karena itu, dalam pengembangan komoditas sayuran diperlukan keberpihakan pemerintah untuk menekan resiko. Kebijakan yang diambil perlu menekankan pada aspek pemasaran (*off-farm*) dan bukan pada aspek produksi (*on-farm*) saja.

Berbagai kebijakan yang memacu produksi yang berorientasi agribisnis hortikultura terutama sayuran masih terbatas. Menurut Agustian *et. al* (2005) kebijakan secara spesifik dan langsung pada komoditas hortikultura dalam memacu produksi mulai mendapat porsi perhatian yang terfokus sejak tahun 2001. Menurut Sutrisno *dalam* Agustian *et. al* (2005) beberapa kebijakan yang dilaksanakan yaitu: (1) pembinaan teknis pengembangan sayuran dan buah-buahan di daerah *hinterland*; (2) pengembangan sistem produksi sayuran pada saat produksi rendah (diluar musim) dan pada saat permintaan tinggi, khususnya cabe dan bawang merah; (3) meningkatnya produksi sayuran dan buah-buahan melalui pemanfaatan pekarangan di pedesaan dan perkotaan; (4) memperbaiki teknik budidaya sayuran dan buah-buahan melalui penerapan cara bercocok tanam secara benar; (5) mengembangkan komoditas ekspor, substitusi impor dan bahan baku industri pengolahan pangan dan minuman; (6) memperbaiki pola tanam; (7) mengembangkan kawasan usahatani terutama yang berorientasi ekspor dan substitusi impor; (8) membina peningkatan mutu dan keamanan hasil; (9) memperbaiki sistem kelembagaan dan manajemen usahatani melalui penumbuhan sentra produksi (perluasan areal

dan pencarian pasar) dan pemantapan sentra produksi (penerapan iptek untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil). Strategi yang harus ditempuh dalam pengembangan komoditas hortikultura adalah (1) menetapkan komoditas unggulan; (2) membuat pewilayahan komoditas yang mengacu pada rencana tata ruang masing-masing daerah; (3) mengembangkan kemitraan antara petani dan pengusaha; (4) memberdayakan kelompok tani; (5) meningkatkan penerapan teknologi rekomendasi dan manajemen usahatani efisien; dan (6) memberdayakan sumberdaya manusia di bidang teknis dan manajemen usahatani (Agustian *et. al* 2005).

Selanjutnya dijelaskan bahwa berdasarkan acuan dari strategi tersebut, maka terdapat tiga pola pengembangan yang dapat ditempuh, yaitu: (1) intensifikasi dan sistem jaminan mutu sesuai dengan dinamika permintaan pasar; (2) memperluas areal tanam melalui penumbuhan daerah pengembangan dengan fokus kegiatan pada penyediaan modal usaha, sentra produksi, pemberdayaan kelompok tani, pelatihan, penyuluhan, pemanfaatan jasa alsintan, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penangkaran bibit; (3) meningkatkan indeks pertanaman dari 200 persen menjadi 300 persen setahun dengan jenis tanaman yang berbeda, khususnya sayuran, dimana teknik pemeliharannya sangat intensif, sarat dengan penerapan teknologi maju dan jarak antar waktu panen sangat singkat. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam rangka memperlancar pemasaran hasil pertanian, pemerintah memberikan fasilitas antara lain; (1) pembinaan kemitraan usaha antara petani atau kelompok tani dengan pengusaha seperti eksportir, pemilik toko swalayan atau pabrik pengolahan makanan-minuman; (2) perbaikan infrastruktur seperti jaringan jalan, pelabuhan, angkutan darat,

laut/ferry dan udara sehingga pengangkutan menjadi semakin efisien; (3) penyediaan informasi pasar; dan (4) pembangunan terminal agribisnis.

Para pelaku yang terlibat dalam pemindahan produk dan jasa mulai dari produsen sampai ke konsumen sangat menentukan keberhasilan pemasaran. Oleh karena itu, untuk mendukung pemasaran maka sarana transportasi perlu mendapat perhatian karena sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan distribusi produk. Karakteristik saluran distribusi komoditas pertanian cenderung bersifat panjang dan dengan nilai yang rendah. Hal ini akan mengurangi keuntungan petani dalam persaingan harga. Karena tingginya biaya pemasaran akibat panjangnya saluran distribusi maka akan mempersempit keleluasan petani untuk menentukan harga jualnya. Hal ini akan menciptakan tingginya biaya pemasaran yang selanjutnya mengurangi daya saing produk di pasar (Mayrowani, 2006).

Sejak Januari 1995, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan sebagai anggota WTO telah menjalankan reformasi kebijakan pertanian dan perdagangan dengan mengacu kepada perjanjian pertanian (*Agreement on Agriculture*) WTO. Semua bentuk NTB (*Non Tariff Barrier*) diubah ke dalam TB (*Tariff Barrier*). Terkait dengan hak atas akses pasar, sesungguhnya semua anggota WTO, baik negara-negara maju, negara-negara sedang berkembang maupun negara-negara terbelakang, berhak mengenakan hambatan tarif impor sebagai alat perlindungan kepada petani dalam negeri. Hambatan tarif itu dapat dikenakan sepanjang tidak melebihi tingkat komitmen tarif yang sudah disepakati (*binding tariff rate*). Selama tarif impor yang diusulkan tidak melebihi *binding rate* negara yang bersangkutan tidak perlu minta izin kepada

WTO. Tetapi jika melebihi, maka hal tersebut harus melalui izin WTO (Dirjen BP2HP dalam Agustian *et. al* 2005).

Sebagian besar ekspor ke Asia dan Afrika harus disertai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh *Asian Standard Committee*. Pungutan tarif dapat dibedakan menurut status negara, untuk barang-barang impor yang berasal dari negara-negara status *Most Favored Nation* (MFN) dikenakan tarif umum, sedangkan dari negara yang tidak berstatus MFN pungutan impor dikenakan tarif dua kali lebih besar dari tarif MFN. Pemerintah telah memberlakukan fasilitas "*Green Corridor*" yaitu mengenai kemudahan pemeriksaan dokumen custom seperti berkaitan dengan *safe guard*, *anti dumping* dan *countervailing measures*. Untuk negara berkembang dikenakan biaya impor sangat rendah dan untuk negara-negara belum berkembang (negara ACP: Afrika, Carriibia, Pasific) dikenakan bea masuk sebesar nol persen. Untuk produk buah-buahan dan sayuran berdasarkan GATT, bea masuk dikurangi sampai 20 persen dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2001. Untuk beberapa produk bea masuk tersebut akan dikurangi sampai 36 persen (Disindagro Propinsi Jawa Barat, 2007).

Jika dilihat dari penelitian terdahulu tentang usahatani cabe merah, diketahui bahwa usahatani cabe merah umumnya menguntungkan dan memiliki daya saing. Dengan menggunakan alat analisis PAM, selain dapat menganalisis daya saing usahatani, juga dapat mengidentifikasi dampak intervensi atau kebijakan pemerintah terhadap sistem usahatani. Kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian di negara berkembang seperti Indonesia masih tetap diperlukan untuk melindungi konsumen maupun produsen dalam negeri, mengingat komoditas pertanian memiliki karakteristik yang khas dan memiliki

peranan strategis dalam struktur perekonomian nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menganalisis tingkat daya saing suatu komoditas dengan memperhitungkan dampak dari kebijakan pemerintah lebih tepat jika menggunakan alat analisis PAM.

*Policy Analysis Matrix* (PAM) atau matrik kebijakan digunakan untuk menganalisis pengaruh intervensi pemerintah dan dampaknya pada sistem komoditas. Sistem komoditas yang dapat dipengaruhi meliputi aktivitas tingkat usahatani, penyampaian dari usahatani ke pengolahan maupun pemasaran (Monke and Pearson, 1989). Metode PAM merupakan suatu analisis yang dapat mengidentifikasi tiga analisis yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial/ekonomi, analisis daya saing (keunggulan kompetitif dan komparatif) serta analisis dampak kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem komoditas.

Matrik terdiri dari tiga baris dan empat kolom, dimana baris pertama adalah perhitungan dengan harga privat atau harga yang aktual untuk mengestimasi keuntungan privat. Keuntungan privat dihitung berdasarkan selisih antara pendapatan dan biaya berdasarkan harga aktual yang mencerminkan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh semua kebijakan dan kegagalan pasar. Keuntungan privat dalam angka absolut atau rasio merupakan indikator keuntungan atau daya saing (keunggulan kompetitif) dari usahatani berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan transfer kebijakan yang ada. Baris kedua merupakan perhitungan keuntungan ekonomi berdasarkan harga sosial atau harga bayangan yaitu harga yang menggambarkan nilai ekonomi yang sesungguhnya bagi unsur-unsur biaya dan hasil, dimana efek kebijakan distorsif dan kegagalan pasar tidak ada. Baris ketiga merupakan selisih antara baris pertama

dan baris kedua yang menggambarkan divergensi. Menurut Pearson, S *et. Al* (2005) bahwa suatu divergensi akan menyebabkan perbedaan hasil perhitungan antara perhitungan berdasarkan harga privat dan perhitungan berdasarkan harga sosial, divergensi dapat disebabkan oleh adanya kegagalan pasar atau kebijakan pemerintah.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. KERANGKA PEMIKIRAN

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan meliputi bagian usahatani cabe merah dan kebijakan pemerintah. Pada bagian usahatani, ditunjukkan bahwa usahatani cabe merah ini ditentukan oleh penggunaan faktor-faktor produksi dan harganya. Begitu pula dengan faktor penunjang lainnya baik yang berkaitan dengan aspek produksi, pemasaran dan pengolahan seperti penyediaan teknologi, penyuluhan, insentif investasi dan ketersediaan investasi publik seperti sarana transportasi, irigasi dan lembaga penelitian sangat diperlukan dalam pengembangan dan kemajuan usahatani cabe merah.

Di negara berkembang seperti Indonesia, intervensi/kebijakan pemerintah untuk komoditas pertanian masih tetap ada, mengingat komoditas pertanian yang memiliki karakteristik yang khas. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam mengelola potensi sumberdaya. Salah satu pendekatan untuk melihat dampak dari kebijakan adalah dengan menganalisis perbedaan harga-harga input baik domestik maupun asing (*tradable*) dan penerimaan finansial dan ekonomi. Dengan menganalisis perbedaan harga-harga finansial dan ekonomi



dapat diketahui tingkat daya saing cabe merah serta dampak kebijakan terhadap daya saing. Apabila dengan kebijakan yang ada mampu memberikan keunggulan kompetitif terhadap komoditas yang di analisis, maka kebijakan tersebut dapat dipertahankan. Namun sebaliknya, jika dengan adanya kebijakan menghambat atau mengurangi nilai kompetitif maka kebijakan tersebut perlu dikaji ulang. Kerangka pemikiran konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

## 2. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilakukan di dua tempat, yaitu Kecamatan Lembang (Desa Wangunharja dan Desa Cikidang) dan Kecamatan Ciwidey (Desa Lebakmuncang, Desa Rawabogo dan Desa Nengkelan). Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan atas pemekaran yang terjadi di Kabupaten Bandung dengan pertimbangan bahwa kedua daerah tersebut merupakan salah satu daerah sentra produksi cabe merah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Setelah pemekaran, Kecamatan Lembang termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat sedangkan Kecamatan Ciwidey termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bandung. Pengumpulan data untuk keperluan penelitian dilakukan dari bulan Desember 2007 sampai bulan Pebruari 2008.

## 3. DATA DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari usahatani komoditas sayuran unggulan. Data usahatani berasal dari wawancara dengan petani yang mengusahakan cabe merah yaitu sebanyak 20 petani (10 petani untuk masing-masing kecamatan).

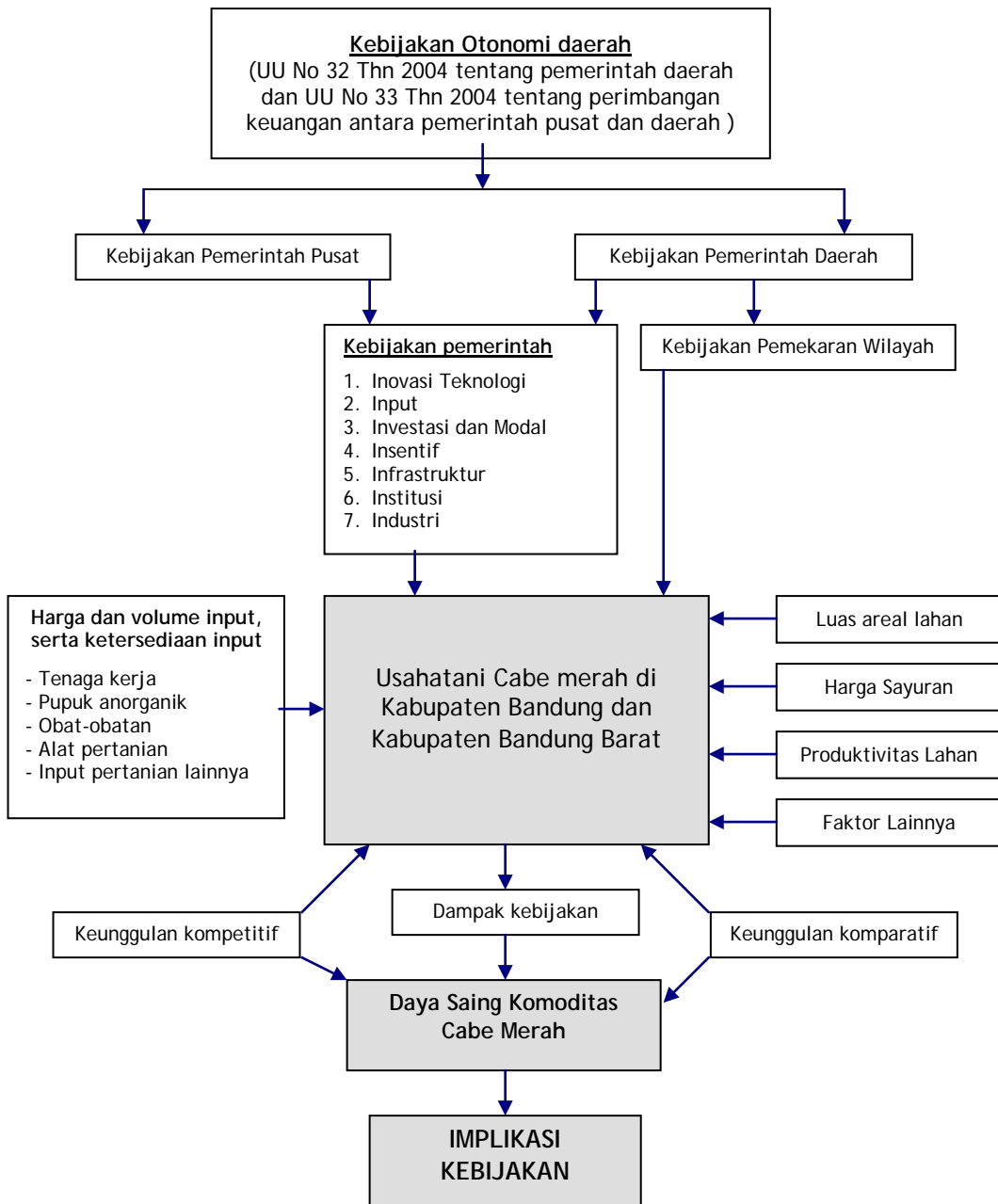
Sedangkan data sekunder berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Departemen Pertanian, BPS, perpustakaan IPB dan dinas-dinas lain yang terkait yang dapat membantu untuk ketersediaan data.

## 4. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini sampel dipilih dengan teknik *snowball sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang relevan untuk menunjuk calon responden yaitu petani cabe merah, kemudian dari petani tersebut diperoleh informasi calon responden selanjutnya.

## 5. METODE ANALISIS

Penelitian ini meliputi analisis daya saing dan kebijakan pemerintah pada usahatani serta analisis simulasi kebijakan terhadap daya saing usahatani cabe merah. Analisis daya saing dan kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode PAM. Tabel matrik analisis kebijakan (PAM) dapat dilihat pada Tabel 3.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Konseptual

Tabel 3. Matrik Analisis Kebijakan (PAM)

Uraian	Penerimaan	Biaya Input		Keuntungan
		Input <i>Tradable</i>	Input <i>Non Tradable</i>	
Harga Privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Dampak Kebijakan dan Distorsi Pasar	I	J	K	L

Sumber : Monke and Paerson (1989)

Keterangan :

1. Keuntungan Privat (D) = A - (B + C)
2. Keuntungan Sosial (H) = E - (F + G)
3. Transfer Output (I) = A - E
4. Transfer Input *Tradable* (J) = B - F
5. Transfer Input *Non Tradable* (K) = C - G
6. Transfer Bersih (L) = I - (K + J)
7. Rasio Biaya Privat (PCR) = C / (A - B)
8. Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (DRC) = G / (E - F)
9. Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) = A/E
10. Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) = B/F
11. Koefisien Keuntungan (PC) = D/H

Asumsi yang digunakan dalam analisis PAM ini adalah :

1. Harga pasar adalah harga yang benar-benar diterima petani yang didalamnya terdapat kebijakan pemerintah (distorsi pasar)
2. Harga bayangan adalah harga pada kondisi pasar persaingan sempurna yang mewakili biaya imbalan sosial yang sesungguhnya. Pada komoditi *tradable*, harga bayangan adalah harga yang terjadi di pasar dunia (internasional)
3. Output bersifat *tradable* sedangkan input dapat dipisahkan berdasarkan faktor asing (*tradable*) dan faktor domestik (*non tradable*)
4. Eksternalitas dianggap sama dengan nol.

Tahapan penyusunan tabel PAM adalah sebagai berikut :

1. Penentuan komponen fisik untuk faktor input dan output secara lengkap dari aktivitas ekonomi usahatani cabe merah.
2. Pemisahan seluruh biaya ke dalam komponen domestik dan asing.
3. Penentuan harga finansial (privat) dan penafsiran harga bayangan (ekonomi) input-output.

4. Tabulasi dan analisis indikator-indikator yang dihasilkan tabel PAM.

### KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN

Wilayah Kabupaten Bandung dibagi menjadi 45 kecamatan yang terdiri dari 431 desa dan 9 kelurahan. Batas wilayah administratif di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta, sebelah barat dengan Kabupaten Cianjur, di sebelah timur dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang, dan di sebelah selatan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur, di bagian tengah terletak Kota Bandung dan Kota Cimahi dan sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.

Pada tahun 2007 Kabupaten Bandung dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Bandung Barat sebagai kabupaten baru hasil pemekaran. Kabupaten Bandung Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2007. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2006 sebanyak 4.399.482 orang, yang tersebar di 45 kecamatan. Setelah terjadi pemekaran,

Kabupaten Bandung hanya memiliki 30 kecamatan karena dikurangi 15 kecamatan yang tergabung ke wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat mewarisi beberapa daerah yang merupakan sentra tanaman sayuran terutama Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua.

Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kecamatan Ciwidey adalah 67.189 orang yang terdiri dari 33.868 laki-laki dan 33.321 perempuan. Dari jumlah tersebut sebanyak 25.163 orang bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah kepala keluarga 18.890 dengan kepadatan penduduk 538 jiwa/km. Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk di Kecamatan Ciwidey adalah petani, nelayan, pedagang, pengrajin, buruh industri, buruh bangunan, buruh pertambangan, buruh perkebunan, pegawai negeri sipil, TNI/POLRI dan peternak. Sedangkan Kecamatan Lembang, pada tahun 2007 berpenduduk 130.424 orang yang terdiri dari 65.753 laki-laki dan 64.671 perempuan. Jumlah kepala keluarga 33.979 orang, yang terdiri dari 21.954 kepala keluarga tani dan 12.135 kepala keluarga bukan tani. Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk Kecamatan Lembang adalah petani hortikultura, pekebun, peternak, petani ikan, pedagang, TNI/POLRI, pegawai negeri sipil dan jasa.

Hasil sensus pertanian 2003 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian dari 535.120 rumah tangga atau 52,2 persen dari total jumlah rumah tangga di Kabupaten Bandung sebanyak 1.024.871, sisanya 47,8 persen didominasi oleh sektor industri, buruh dan perdagangan. Hal ini menunjukkan peran dominan sektor pertanian dalam struktur ekonomi rumah tangga pedesaan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bandung adalah seluas 298.646 hektar, yang

terdiri dari lahan sawah seluas 64.906 hektar dan lahan kering seluas 251.523 hektar, sebagian besar merupakan lahan produktif meskipun masih sebagian belum dimanfaatkan secara optimal. Luas Kecamatan Ciwidey adalah 3.474 hektar terdiri dari lahan sawah 1.436 hektar, tanah kering 2.038 hektar, lahan basah 17 hektar, tanah hutan 289 hektar, tanah perkebunan 33 hektar dan tanah keperluan fasilitas umum 47,5 hektar. Luas wilayah Kecamatan Lembang 10.637,916 hektar terdiri dari lahan sawah 25 hektar, lahan bukan sawah 612,013 hektar, tegal/kebun 5.153,224 hektar, kolam 22,7 hektar, hutan negara dan perkebunan 4.164,083 hektar.

Pada tahun 2006 Kecamatan Ciwidey menghasilkan cabe merah 13.845 kwintal atau **4,77 persen** dari total produksi cabe merah di **Kabupaten Bandung**. Sedangkan Kecamatan Lembang mampu menghasilkan cabe 46.790 kwintal atau **16,11 persen** dari total produksi cabe merah di **Kabupaten Bandung**. Cabe merah diusahakan dengan pola tumpang sari baik di kedua kecamatan, petani umumnya menanam cabe merah dengan tomat, sawi, selada, petcai dan burkol. Sistem tumpang sari bertujuan untuk meminimalkan resiko kerugian bila harga atau produksi cabe merah sedang rendah, sehingga biaya yang telah dikeluarkan dapat ditanggung oleh dua atau lebih komoditas yang ditanam.

Pola pertanaman cabe merah di Kecamatan Lembang dilakukan secara terus-menerus, sedangkan di Kecamatan Ciwidey cabe merah dilakukan secara bergantian dengan komoditi lain terutama untuk lahan sawah, ketika musim hujan petani memilih bertani padi karena lebih menguntungkan. Selain itu jika dipaksakan menanam cabe merah akan dibutuhkan perawatan yang lebih intensif, bahkan biaya obat-obatan dua sampai

tiga kali lipat dari musim biasanya. Masa produktif untuk tanaman cabe merah adalah 7-8 bulan, memasuki bulan keempat tanaman sudah dapat dipanen. Pemetikan rata-rata dilakukan sebanyak 15 sampai 20 kali. waktu pemetikan setiap 5-7 hari dengan masa panen 3 bulan.

Ketidakpastian kondisi alam merupakan faktor yang mempengaruhi produksi. Selain itu, fluktuasi harga yang tinggi mengakibatkan resiko usahatani sangat tinggi. Keunikan cabe merah tersebut menimbulkan berbagai permasalahan baik dalam budidaya maupun pemasarannya yang memerlukan sistem manajemen usahatani yang baik mulai dari budidaya sampai pemasarannya. Beberapa permasalahan yang umumnya dikeluhkan oleh para petani adalah harga sarana produksi mahal, sulit mendapatkan modal usaha, produksi yang rendah terutama di musim hujan dan fluktuasi harga. Petani tidak dapat menghindari hal tersebut karena adanya keterbatasan modal. Seperti diketahui bahwa ketika musim hujan harga cabe merah akan tinggi, tetapi pada saat itu serangan hama dan penyakit sangat tinggi juga sehingga diperlukan modal lebih untuk membeli obat-obatan.

Sifat komoditas sayuran yang *perishible*, *bulky* dan produksi bersifat musiman mengharuskan pemasaran yang lebih cepat, karena apabila tidak segera dipasarkan akan terjadi penurunan kesegaran dan pada akhirnya akan mempengaruhi harga jual. Panjangnya saluran pemasaran tentunya akan mempengaruhi harga sayuran di tingkat

konsumen akhir. Perdagangan cabe merah dimulai dari petani produsen sampai ke konsumen akhir. Ada beberapa saluran pemasaran dalam penyampaian komoditas tersebut ke konsumen akhir: (1) petani - pedagang pengumpul - pedagang besar - pasar induk caringin (Bandung) - pengecer - konsumen; (2) petani - pedagang pengumpul - pedagang besar - pasar induk Kramat Jati (Jakarta) - pengecer - konsumen; dan (3) petani - pedagang pengumpul - pedagang besar - supermarket - konsumen.

Pedagang pengumpul pada saluran pemasaran ketiga biasanya sekaligus sebagai pedagang besar, ada beberapa pedagang besar dalam saluran pemasaran ke supermarket baik yang ada di Kabupaten Bandung atau Kota Bandung diantaranya CV Bimandiri, CV Putri Segar, PT Multi Fresh Farm, PT Alamanda Sejati Utama, dan PD Rama Putra.

## DAYA SAING DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA USAHATANI CABE MERAH

### 1. ANALISIS KEUNTUNGAN USAHATANI CABE MERAH

Hasil analisis keuntungan privat dan keuntungan sosial usahatani cabe merah dari kedua tempat penelitian yang merupakan salah satu daerah sentra produksi di Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Ciwidey dan di Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Lembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Nilai Keuntungan Usahatani Cabe Merah Di Kecamatan Ciwidey dan Di Kecamatan Lembang Per Hektar Per Musim Tanam (dalam Juta Rupiah) tahun 2008

Keuntungan	Kecamatan Ciwidey	Kecamatan Lembang
Finansial atau Privat	29,274	36,194
Ekonomi atau Sosial	37,727	35,575

Secara umum usahatani cabe merah di kedua kecamatan menguntungkan baik secara finansial maupun ekonomi. Adanya perbedaan kesuburan tanah dan pengalaman bertani, menyebabkan cara bertani yang berbeda di kedua daerah. Perbedaan tersebut dapat dicermati dari penggunaan input yang berbeda baik dari jenis, volume maupun harga. Perbedaan kesuburan tanah dan cara bertani menyebabkan keuntungan privat dan keuntungan ekonomi usahatani cabe merah tersebut berbeda di kedua tempat penelitian.

Keuntungan finansial usahatani cabe merah di Kecamatan Ciwidey adalah 29,274 juta rupiah per hektar per musim tanam atau sebesar 50,45 persen dari total penerimaan, sementara di Kecamatan Lembang sebesar 36,194 juta rupiah atau sebesar 51,23 persen dari total penerimaan. Sementara tingkat produktivitas cabe merah di Lembang adalah 9,50 ton per hektar per musim tanam lebih tinggi dibandingkan di Ciwidey sebesar 8,96 ton per hektar per musim tanam.

Perhitungan keuntungan ekonomi pada penelitian ini didasarkan pada kondisi tidak ada kebijakan pemerintah dalam usahatani cabe merah atau tanpa adanya distorsi pasar, sehingga harga input-output yang berlaku mencerminkan harga sosial yang sebenarnya. Secara umum, keuntungan ekonomi usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian lebih besar dari nol, artinya usahatani tersebut memperoleh keuntungan atas biaya normal yang dihitung berdasarkan harga sosial/bayangan. Tingkat keuntungan ekonomi

usahatani cabe merah di Ciwidey 37,727 juta rupiah atau 54,26 persen dari total penerimaan, sementara di Lembang sebesar 35,575 juta rupiah atau 48,25 persen dari total penerimaan. Keuntungan ekonomi usahatani cabe merah di Ciwidey relatif lebih besar dibandingkan di Lembang. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani cabe merah di Ciwidey relatif lebih memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dibandingkan di Lembang.

Tingkat keuntungan ekonomi usahatani cabe merah di Ciwidey lebih besar dari keuntungan finansialnya, artinya adanya kebijakan atau intervensi pemerintah mengakibatkan keuntungan yang diterima petani menjadi lebih kecil dari keuntungan yang seharusnya diterima apabila tanpa adanya kebijakan atau intervensi pemerintah. Sementara di Lembang tingkat keuntungan ekonomi usahatani cabe merah lebih kecil dari keuntungan finansialnya, hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan atau intervensi dari pemerintah justru memberikan insentif yang baik pada usahatani tersebut sehingga keuntungan yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dibanding keuntungan yang diperoleh tanpa adanya kebijakan atau intervensi pemerintah.

## 2. ANALISIS DAYA SAING USAHATANI CABE MERAH

Hasil analisis PAM yang digunakan untuk mengukur tingkat daya saing adalah nilai DRC dan PCR yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Indikator Daya Saing Usahatani Cabe Merah di Kecamatan Ciwidey dan di Kecamatan Lembang per Hektar per Musim Tanam. Tahun 2008

Indikator	Kecamatan Ciwidey	Kecamatan Lembang
PCR → <i>competitive</i>	0,44	0,45
DRC → <i>comparative</i>	0,39	0,46

Berdasarkan nilai DRC, usahatani cabe merah di kedua daerah menghasilkan nilai DRC yang kurang dari satu. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil analisis keuntungan sosial pada Tabel 4 yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani cabe merah di Ciwidey dan di Lembang memiliki tingkat efisiensi ekonomi yang relatif tinggi dalam menggunakan sumberdaya ekonomi yang langka, yaitu lahan yang cocok dan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan atau intervensi, secara ekonomi usahatani cabe merah di kedua daerah memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi untuk dikembangkan, sehingga akan lebih menguntungkan apabila diproduksi sendiri di dalam negeri dibandingkan mengimpor karena untuk menghasilkan atau memproduksi satu satuan nilai tambah memerlukan pengorbanan sumberdaya ekonomi yang lebih kecil dari satu satuan.

Dengan membandingkan nilai indikator tersebut, Kecamatan Ciwidey lebih efisien dalam menggunakan sumberdaya dibandingkan dengan Kecamatan Lembang. Hal tersebut dapat dicermati dari nilai DRC cabe merah di Ciwidey sebesar 0,39 relatif lebih kecil dibandingkan di Lembang sebesar 0,46.

Keunggulan kompetitif dilihat dari alokasi sumberdaya untuk mencapai efisiensi privat. Efisiensi privat diukur dengan Rasio Biaya Privat (PCR). PCR merupakan rasio antara biaya faktor domestik dengan nilai tambah output dan biaya input yang diperdagangkan pada harga aktual atau pada kondisi dibawah kebijakan pemerintah. Nilai PCR menunjukkan kemampuan usahatani dalam membiayai faktor domestik pada harga aktual. Semakin kecil nilai PCR, maka semakin tinggi tingkat

keunggulan kompetitif dari perusahaan cabe merah tersebut. Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian memiliki keunggulan kompetitif atau mempunyai daya saing, dibawah kebijakan pemerintah yang ada. Hal ini terlihat dari nilai PCR yang kurang dari satu. Hasil ini sejalan dengan tingkat keuntungan privat yang dihasilkan usahatani cabe merah di kedua daerah yang bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk memproduksi atau menghemat satu unit nilai tambah memerlukan faktor domestik lebih kecil dari satu unit, dengan kata lain komoditas tersebut mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat.

Apabila dibandingkan, nilai PCR cabe merah di Ciwidey dan di Lembang tidak signifikan perbedaannya, dengan kata lain Ciwidey dan Lembang memiliki keunggulan kompetitif yang tidak berbeda signifikan terhadap usahatani cabe merah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah terhadap usahatani cabe merah di Lembang berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitifnya. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa keunggulan komparatif Kecamatan Lembang terhadap cabe merah relatif lebih rendah dibandingkan Kecamatan Ciwidey, tetapi dengan adanya kebijakan pemerintah, Kecamatan Lembang justru dapat memiliki keunggulan kompetitif yang relatif sejajar dengan Kecamatan Ciwidey.

Berdasarkan hasil analisis daya saing baik secara komparatif maupun kompetitif maka dapat disusun suatu prioritas dalam pemilihan lokasi usahatani cabe merah diantara kedua tempat penelitian seperti terlihat pada Tabel 6.

**Table 6. Prioritas Tempat Usahatani Cabe Merah Diantara Kedua Tempat Penelitian Berdasarkan Kriteria Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif.**

Uraian	Prioritas 1	Prioritas 2
- Keunggulan Komparatif	Ciwidey	Lembang
- Keunggulan Kompetitif	Ciwidey	Lembang
Maka Prioritas tempat usahatani	Ciwidey	Lembang

Kriteria dalam menentukan prioritas tempat usahatani cabe merah adalah tempat yang memiliki daya saing baik keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif, dimana keunggulan komparatif menjadi kriteria yang utama. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang bersumber dari kelimpahan dan kekhasan wilayahnya, sehingga sulit untuk diciptakan. Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa Ciwidey memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan Lembang. Mengingat tempat penelitian merupakan salah satu daerah sentra produksi sayuran di Kabupaten Bandung dan di Kabupaten Bandung Barat, maka secara ekonomis akan lebih menguntungkan untuk memprioritaskan pengembangan usahatani cabe merah tersebut di daerah yang lebih memiliki keunggulan komparatif.

### 3. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Adanya intervensi pemerintah menyebabkan harga output berbeda antara harga yang diterima petani dengan harga yang

terjadi di pasar internasional. Kebijakan pemerintah biasanya terdiri dari kebijakan subsidi baik subsidi positif atau negatif. Dampak kebijakan pemerintah terhadap output dapat teridentifikasi dari Nilai Transfer Output (OT) dan Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) seperti dapat dilihat pada Tabel 7.

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa nilai Transfer Output (OT) dari usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan atau intervensi pemerintah pada output terhadap usahatani cabe merah tersebut lebih menguntungkan konsumen dengan kata lain telah terjadi pengalihan surplus dari petani ke konsumen, sehingga distorsi pasar yang terjadi mengakibatkan harga aktual cabe merah lebih rendah dari harga sosialnya. Kenyataan tersebut membuat petani dirugikan karena tidak memperoleh penerimaan yang seharusnya dapat mereka terima dalam kondisi tanpa adanya intervensi atau kebijakan pemerintah. Sebaliknya konsumen atau pedagang menerima insentif dari petani.

**Tabel 7. Nilai Indikator Dampak Kebijakan Output Terhadap Daya Saing Usahatani Cabe Merah di Kecamatan Ciwidey dan di Kecamatan Lembang per Hektar per Musim Tanam, tahun 2008.**

Indikator	Kecamatan Ciwidey	Kecamatan Lembang
Transper Output (OT) (Dalam Rupiah)	- 11.502.420,72	- 3.075.228,06
NPCO	0,83	0,96



Berdasarkan nilai OT yang bernilai negatif, menunjukkan bahwa adanya kebijakan terhadap output membuat penerimaan petani berkurang. Dengan adanya kebijakan output, penerimaan petani cabe merah di Ciwidey berkurang sebesar 11.502.420,72 rupiah relatif lebih tinggi dibanding petani cabe merah di Lembang yang berkurang hanya sebesar 3.075.228,06 rupiah. Dengan kata lain, kebijakan terhadap output yang ada cenderung melindungi konsumen, karena dengan adanya kebijakan, konsumen menerima harga cabe merah lebih rendah dari harga sosialnya.

Nilai NPCO adalah rasio antara penerimaan yang dihitung berdasarkan harga privat dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan harga bayangan. Nilai NPCO menunjukkan dampak kebijakan dan kegagalan pasar yang tidak terkoreksi dengan kebijakan efisiensi sehingga menyebabkan divergensi harga privat dengan harga sosial atas output. NPCO merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat besarnya dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas cabe merah yang dianalisis. Dari Tabel di atas, nilai NPCO cabe merah di Ciwidey dan di Lembang kurang dari satu, artinya petani cabe merah di kedua tempat tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, karena harga aktual cabe merah yang diterima petani lebih rendah dari harga sosialnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produsen tidak mendapatkan insentif dari pemerintah untuk

meningkatkan produksinya. Berdasarkan nilai NPCO di atas, petani cabe merah di Ciwidey menerima harga aktual cabe merah hanya sebesar 83 persen dari harga sosialnya, dengan kata lain petani di Ciwidey menerima harga aktual cabe merah 17 persen lebih rendah dari harga sosialnya. Demikian juga untuk usahatani cabe merah di Lembang, petani cabe merah di Lembang menerima harga aktual cabe merah hanya sebesar 96 persen dari harga sosialnya, 4 persen lebih rendah dari harga sosialnya.

Untuk mengidentifikasi kebijakan atau intervensi pemerintah yang mempengaruhi harga input asing di pasar dalam negeri digunakan indikator nilai Transfer Input (IT), dan Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI). Sedangkan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah terhadap input domestik (*non tradable*) digunakan indikator Transfer Faktor. Adapun jenis input asing (*tradable*) dalam penelitian ini antara lain benih, pupuk anorganik, dan obat-obatan. Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan input terhadap usahatani cabe merah dapat dilihat pada Tabel 8.

Nilai transfer input (IT) merupakan selisih antara biaya input *tradable* pada harga privat dengan biaya input *tradable* pada harga sosial. Nilai IT di kedua tempat bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan subsidi kepada usahatani cabe merah atas penggunaan input asing (*tradable*). Subsidi pada harga input tersebut

Tabel 8. Nilai Indikator Dampak Kebijakan Input Terhadap Usahatani Cabe Merah di Kecamatan Ciwidey dan di Kecamatan Lembang per Hektar per Musim Tanam Tahun 2008.

Indikator	Kecamatan Ciwidey	Kecamatan Lembang
Transfer Input (IT) (dalam rupiah)	-2.256.571,65	-2.256.827,55
NPCI	0,71	0,70
Transfer Faktor (FT) (dalam rupiah)	-793.456,99	-1.438.244,63

mengakibatkan biaya input pada harga aktual lebih rendah dari harga sosialnya, sehingga petani menerima harga input asing lebih murah dari yang seharusnya dibayarkan jika tanpa adanya kebijakan. Bentuk subsidi tersebut dapat berupa pengadaan sarana dan prasarana pertanian. Subsidi input asing relatif lebih besar diterima petani di Lembang yang menerima subsidi sebesar 2.256.827,55 rupiah. Sedangkan petani di Ciwidey menerima subsidi sebesar 2.256.571,65 rupiah. Petani cabe merah di Lembang menerima subsidi lebih besar dibanding petani di Ciwidey, petani cabe merah di Lembang menerima subsidi 255,90 rupiah atau 0,01 persen lebih besar dari subsidi yang diterima petani di Ciwidey.

Koefisien proteksi input nominal (NPCI) adalah rasio antara biaya input *tradable* berdasarkan harga sosial atau harga bayangan dengan harga finansial. Perbedaan antara kedua biaya tersebut menunjukkan adanya kebijakan yang mengakibatkan harga finansial input *tradable* berbeda dengan harga sosial input *tradable*. Nilai NPCI digunakan untuk mengukur dampak kebijakan input tersebut, dimana nilai NPCI cabe merah di kedua tempat penelitian kurang dari satu. Artinya dengan adanya kebijakan input asing (*tradable*), petani cabe merah di kedua tempat secara tidak langsung menerima subsidi atas input asing (*tradable*) sehingga petani dapat membeli input asing (*tradable*) lebih rendah dari harga sosialnya. Petani cabe merah di

Ciwidey dan di Lembang membeli input asing (*tradable*) lebih rendah berturut-turut sebesar 29 persen dan 30 persen dari harga sosialnya.

Transfer Faktor (FT) adalah perbedaan harga sosial dengan harga finansial yang diterima oleh produsen untuk pembayaran faktor produksi yang tidak diperdagangkan (*non tradable*/input domestik). Nilai FT yang bernilai negatif menunjukkan terdapat kebijakan pemerintah yang memberikan insentif kepada petani atas penggunaan input domestik (*non tradable*), sehingga petani harus membayar input domestik (*non tradable*) lebih rendah dari harga sosialnya. Berdasarkan besaran nilai FT, usahatani cabe merah di Lembang relatif lebih diuntungkan dengan adanya kebijakan, karena subsidi terhadap input domestik yang diterima petani cabe merah di Lembang adalah 1.438.244,63 rupiah relatif lebih besar dari petani di Ciwidey yang hanya menerima subsidi sebesar 793.456,99 rupiah.

Kebijakan pemerintah pada input-output adalah analisis gabungan antara kebijakan input dan kebijakan output. Dampak kebijakan secara keseluruhan baik terhadap input maupun terhadap output dapat dilihat dari Koefisien Proteksi Efektif (EPC), transfer bersih (NT), koefisien keuntungan (PC) dan rasio subsidi produsen (SRP). Hasil analisis dampak kebijakan input-output terhadap usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Nilai Indikator Dampak Kebijakan Input-Output Terhadap Usahatani Cabe Merah di Kecamatan Ciwidey dan Lembang per Hektar per Musim Tanam Tahun 2008.**

Indikator	Kecamatan Ciwidey	Kecamatan Lembang
Koefisien proteksi efektif (EPC)	0,85	0,99
Transfer Bersih (NT) (dalam rupiah)	-8.452.392,08	619.844,11
Koefisien Keuntungan (PC)	0,78	1,02
Rasio Subsidi Produsen (SRP)	-0,12	0,01

Nilai Koefisien Proteksi Efektif (EPC) menggambarkan sejauh mana kebijakan pemerintah bersifat melindungi atau menghambat produksi domestik. Nilai EPC usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian bernilai kurang dari satu. Artinya kebijakan yang ada tidak melindungi petani cabe merah tersebut atau penerapan instrumen kebijakan pemerintah dalam pasar input-output berdampak disinsentif atau menghambat terhadap pengembangan usahatani cabe merah. Namun jika dicermati nilai EPC cabe merah di Lembang mendekati nilai satu, hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebijakan di Lembang relatif memberikan insentif terhadap usahatani cabe merah di daerah tersebut dibandingkan di Ciwidey.

Nilai Transfer Bersih (NT) mencerminkan dampak kebijakan pemerintah secara keseluruhan terhadap penerimaan petani apakah merugikan petani atau sebaliknya. Nilai NT usahatani cabe merah di Ciwidey bernilai negatif. Hal tersebut mencerminkan adanya pengurangan nilai tambah atau surplus petani akibat adanya kebijakan, sehingga petani Ciwidey dirugikan sebesar 8.452.392,08 rupiah, sedangkan petani cabe merah di Lembang justru menerima surplus sebesar 619.844,11 rupiah.

Koefisien Keuntungan (PC) merupakan indikator yang menunjukkan dampak insentif dari semua kebijakan output, kebijakan input asing (*tradable*) dan input domestik (*net policy transfer*). Berdasarkan nilai PC memperlihatkan bahwa nilai PC cabe merah di Lembang lebih besar dari satu, sedangkan PC cabe merah di Ciwidey bernilai kurang dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap usahatani cabe merah di Lembang, sehingga mampu meningkatkan

keuntungan petani cabe merah sebesar 2 persen dari keuntungan yang seharusnya diterima tanpa adanya kebijakan. Namun sebaliknya untuk usahatani cabe merah di Ciwidey, dengan adanya kebijakan menyebabkan keuntungan yang diterima lebih rendah dari keuntungan sosial.

Nilai SRP menunjukkan proporsi penerimaan produsen pada harga sosial yang dapat menutupi subsidi dan pajak sehingga melalui nilai SRP memungkinkan membuat perbandingan tentang besarnya subsidi perekonomian bagi suatu sistem komoditas. Nilai SRP cabe merah di Lembang bernilai positif yaitu sebesar 0,01 artinya, petani cabe merah di Lembang menikmati tambahan keuntungan yang diterima dibandingkan keuntungan sosialnya. Dengan kata lain, petani cabe merah di Lembang membayar biaya produksi lebih kecil dari tambahan keuntungan yang diterima. Hal sebaliknya terjadi pada usahatani cabe merah di Ciwidey, nilai SRP usahatani cabe merah justru bernilai negatif. Artinya telah terjadi transfer dari petani ke pemerintah atau konsumen, dengan kata lain, kebijakan pemerintah berpengaruh negatif terhadap struktur biaya produksi, karena biaya yang diinvestasikan petani lebih besar dari pada nilai tambah keuntungan yang dapat diterima.

## DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DAYA SAING USAHATANI CABE MERAH

Peningkatan biaya produksi yang terdiri dari kenaikan harga benih sebesar 12,5 persen, kenaikan harga pupuk sebesar 16 persen, kenaikan harga obat-obatan sebesar 12,5 persen dan kenaikan upah sebesar 12 persen akan berdampak pada berkurangnya

keuntungan dan daya saing usahatani cabe merah seperti dapat dilihat pada Tabel 10.

Peningkatan biaya produksi menyebabkan penurunan keuntungan pada usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian. Keuntungan usahatani cabe merah di Ciwidey adalah 26,53 juta rupiah atau mengalami penurunan keuntungan sebesar 2,74 juta rupiah atau 9,36 persen dari kondisi awal, sementara di Lembang keuntungannya sebesar 33,74 juta rupiah terjadi penurunan keuntungan sebesar 2,45 juta rupiah atau 6,78 persen dari kondisi awal. Seperti telah diuraikan di atas bahwa peningkatan biaya produksi menyebabkan tingkat keuntungan menjadi lebih kecil dari kondisi awal. Namun demikian, usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian tetap memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, hal ini dapat dicermati dari nilai PCR dan DRC yang nilainya masih lebih kecil dari satu. Namun peningkatan biaya produksi menyebabkan tingkat daya saing cabe

merah menjadi lebih rendah dari kondisi awal, hal ini dapat dilihat dari nilai PCR dan DRC setelah peningkatan biaya produksi menjadi lebih besar dari kondisi awal.

Penurunan harga output yang terjadi, yaitu penurunan harga cabe merah sebesar 7 persen akan berdampak pada keuntungan dan daya saing usahatani cabe merah seperti dapat dilihat pada Tabel 11.

Penurunan harga output menyebabkan menurunnya keuntungan dan daya saing. Usahatani cabe merah di Ciwidey memperoleh keuntungan sebesar 25,21 juta rupiah atau terjadi penurunan keuntungan sebesar 4,06 juta rupiah atau sebesar 13,87 persen dari kondisi awal, sementara usahatani cabe merah di Lembang memperoleh keuntungan sebesar 31,25 juta rupiah, terjadi penurunan keuntungan sebesar 4,95 atau 13,67 persen lebih rendah dari kondisi awal. Penurunan harga output menyebabkan keuntungan

**Tabel 10. Indikator Keuntungan dan Daya Saing Usahatani Cabe Merah di Ciwidey dan di Lembang per Hektar per Musim Tanam, Tahun 2008 Akibat Peningkatan Biaya Produksi.**

Indikator	Kecamatan Ciwidey		Kecamatan Lembang	
	Kondisi 1	Kondisi 2	Kondisi 1	Kondisi 2
Keuntungan privat (juta)	29,27	26,53	36,19	33,74
Keuntungan ekonomi (juta)	37,73	33,79	35,58	32,16
PCR	0,44	0,49	0,45	0,48
DRC	0,39	0,45	0,46	0,51

Keterangan : Kondisi 1 = kondisi awal  
Kondisi 2 = kondisi setelah peningkatan biaya produksi (kenaikan harga benih 12.5 persen, kenaikan harga pupuk 16 persen, kenaikan harga obat-obatan 12.5 persen dan kenaikan upah 12 persen)

**Tabel 11. Indikator Keuntungan dan Daya Saing Usahatani Cabe Merah di Ciwidey dan di Lembang per Hektar per Musim Tanam, Tahun 2008 Akibat Penurunan Harga Output**

Indikator	Kecamatan Ciwidey		Kecamatan Lembang	
	Kondisi 1	Kondisi 2	Kondisi 1	Kondisi 2
Keuntungan privat (juta)	29,27	25,21	36,19	31,25
Keuntungan ekonomi (juta)	37,73	32,86	35,58	30,41
PCR	0,44	0,48	0,45	0,48

Keterangan : Kondisi 1 = kondisi awal  
Kondisi 2 = kondisi setelah terjadinya penurunan harga output 7 persen

usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian mengalami penurunan daya saing. Hal ini terlihat dari nilai PCR setelah penurunan harga output yang lebih besar dibanding kondisi awal.

Apabila produksi usahatani cabe merah mengalami penurunan sebesar 36 persen, maka usahatani di kedua tempat akan mengalami penurunan keuntungan dan daya saing. Perubahan keuntungan dan daya saing tersebut dapat dilihat pada Tabel 12.

Usahatani cabe merah di Ciwidey memperoleh keuntungan sebesar 8,78 juta rupiah atau terjadi penurunan keuntungan sebesar 20,49 juta rupiah atau 70,00 persen dari kondisi awal. Sedangkan petani di Lembang memperoleh keuntungan sebesar

11,16 juta rupiah atau mengalami penurunan keuntungan sebesar 25,03 juta rupiah atau 69,16 persen dari kondisi awal. Terjadinya penurunan produksi menyebabkan daya saing komoditas cabe merah di kedua tempat menjadi lebih rendah dibanding kondisi awal. Hal ini dapat dicermati dari nilai PCR dan DRC yang nilainya lebih besar dari kondisi normal. Namun demikian, kedua komoditas tersebut masih tetap memiliki daya saing karena nilai PCR dan DRC masih lebih kecil dari satu.

Hasil analisis keuntungan dan daya saing dari usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian setelah adanya peningkatan biaya produksi dan penurunan harga output secara bersamaan dapat dilihat pada Tabel 13.

**Tabel 12. Indikator Keuntungan dan Daya Saing Usahatani Cabe Merah di Ciwidey dan di Lembang per Hektar per Musim Tanam, Tahun 2008 Akibat Penurunan Produksi**

Indikator	Kecamatan Ciwidey		Kecamatan Lembang	
	Kondisi 1	Kondisi 2	Kondisi 1	Kondisi 2
Keuntungan privat (juta)	29,27	8,78	36,19	11,16
Keuntungan ekonomi (juta)	37,73	14,09	35,58	10,49
PCR	0,44	0,72	0,45	0,72
DRC	0,39	0,62	0,46	0,74

Keterangan : Kondisi 1 = kondisi awal  
 Kondisi 2 = Kondisi setelah terjadi penurunan produksi 36 persen

**Tabel 13. Indikator Keuntungan Dan Daya Saing Usahatani Cabe Merah Di Ciwidey dan Di Lembang per Hektar per Musim Tanam, Tahun 2008 Akibat Peningkatan Biaya Produksi dan Penurunan Harga Output**

Indikator	Kecamatan Ciwidey		Kecamatan Lembang	
	Kondisi 1	Kondisi 2	Kondisi 1	Kondisi 2
Keuntungan privat (juta)	29,27	22,47	36,19	28,80
Keuntungan ekonomi (juta)	37,73	28,93	35,58	26,99
PCR	0,44	0,53	0,45	0,52
DRC	0,39	0,49	0,46	0,55

Keterangan : Kondisi 1 = kondisi awal  
 Kondisi 2 = kondisi setelah terjadinya peningkatan biaya produksi dan penurunan harga output secara bersamaan

Usahatani cabe merah di Ciwidey memperoleh keuntungan sebesar 22.470.000 rupiah atau mengalami penurunan keuntungan sebesar 6,80 juta rupiah atau sebesar 23,24 persen dari kondisi awal, sementara usahatani cabe merah di Lembang memperoleh keuntungan sebesar 28.800.000 juta rupiah atau mengalami penurunan keuntungan sebesar 7,39 juta rupiah atau 20,44 persen dari kondisi awal. Dengan demikian, walaupun terjadi kombinasi perubahan peningkatan biaya produksi dan penurunan harga output, usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian masih menguntungkan baik secara finansial maupun secara ekonomi. Peningkatan biaya produksi dan penurunan harga output menyebabkan nilai PCR dan DRC dari kedua komoditas yang dianalisis di kedua tempat penelitian tetap bernilai kurang dari satu, hal tersebut menunjukkan bahwa kedua komoditas tersebut masih tetap memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Hasil analisis keuntungan dan daya saing dari usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian setelah adanya peningkatan biaya produksi dan penurunan produksi secara bersamaan dapat dilihat pada Tabel 14.

Usahatani cabe merah di Ciwidey memperoleh keuntungan sebesar 6,04 juta rupiah atau terjadi penurunan keuntungan sebesar 79,36 persen dari kondisi awal. Sementara usahatani cabe merah di Lembang memperoleh keuntungan sebesar 8,17 juta rupiah atau terjadi penurunan keuntungan sebesar 75,93 persen dari kondisi awal. Walaupun kedua komoditas mengalami penurunan keuntungan akibat peningkatan biaya produksi yang disertai dengan penurunan produksi, namun kedua komoditas tersebut masih memiliki daya saing baik secara kompetitif maupun komparatif. Hal ini dapat dicermati dari nilai PCR dan DRC cabe merah di kedua tempat penelitian yang bernilai kurang dari satu, tetapi nilai PCR dan DRC setelah terjadi peningkatan biaya produksi yang disertai dengan penurunan produksi lebih besar dari kondisi awal. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan biaya produksi yang disertai dengan penurunan produksi telah mengakibatkan daya saing cabe merah di kedua tempat penelitian menjadi berkurang.

Hasil analisis keuntungan privat dan daya saing cabe merah di kedua tempat setelah adanya peningkatan biaya produksi, penurunan harga output dan penurunan produksi secara bersamaan, dapat dilihat pada Tabel 15.

**Tabel 14. Indikator Keuntungan dan Daya Saing Usahatani Cabe Merah Di Ciwidey dan Di Lembang per Hektar per Musim Tanam, Tahun 2008 Akibat Peningkatan Biaya Produksi dan Penurunan Produksi**

Indikator	Kecamatan Ciwidey		Kecamatan Lembang	
	Kondisi 1	Kondisi 2	Kondisi 1	Kondisi 2
Keuntungan privat (juta)	29,27	6,04	36,19	8,71
Keuntungan ekonomi (juta)	37,73	10,15	35,58	7,07
PCR	0,44	0,81	0,45	0,78
DRC	0,39	0,72	0,46	0,82

Keterangan : Kondisi 1 = kondisi awal  
Kondisi 2 = kondisi setelah terjadinya peningkatan biaya produksi dan penurunan produksi secara bersamaan

**Tabel 15. Indikator Keuntungan dan Daya Saing Usahatani Cabe Merah Di Ciwidey dan Di Lembang per Hektar per Musim Tanam, Tahun 2008 Akibat Peningkatan Biaya Produksi, Penurunan Produksi dan Penurunan Harga Output**

Indikator	Kecamatan Ciwidey		Kecamatan Lembang	
	Kondisi 1	Kondisi 2	Kondisi 1	Kondisi 2
Keuntungan privat (juta)	29,27	3,44	36,19	5,54
Keuntungan ekonomi (juta)	37,73	7,04	35,58	3,77
PCR	0,44	0,88	0,45	0,85
DRC	0,39	0,79	0,46	0,90

Keterangan : Kondisi 1 = kondisi awal  
 Kondisi 2 = kondisi setelah terjadinya peningkatan biaya produksi, penurunan produksi dan penurunan harga output secara bersamaan

Apabila terjadi peningkatan biaya produksi, penurunan produksi dan penurunan harga output secara bersamaan, usahatani cabe merah di Ciwidey memperoleh keuntungan sebesar 3,44 juta rupiah atau terjadi penurunan keuntungan sebesar 88,23 persen dari kondisi awal, sementara usahatani cabe merah di Lembang memperoleh keuntungan sebesar 5,54 juta rupiah atau turun sebesar 84,69 persen dari kondisi awal. Peningkatan biaya produksi dan penurunan harga yang disertai dengan penurunan produksi membuat usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian semakin tidak efisien atau dengan kata lain daya saing cabe merah tersebut menjadi rendah. Walaupun demikian, usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian masih tetap berdaya saing, hal tersebut tergambarkan dari nilai keuntungan privat dan keuntungan sosial yang lebih besar dari nol dan nilai PCR dan DRC yang lebih kecil dari satu. Hal tersebut menunjukkan bahwa usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian tetap layak untuk dikembangkan baik secara finansial maupun ekonomi.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### KESIMPULAN

1. Usahatani cabe merah di kedua tempat penelitian menguntungkan baik secara finansial maupun ekonomi dimana Lembang menghasilkan keuntungan finansial yang relatif lebih besar dibandingkan Ciwidey.
2. Cabe merah di kedua tempat menghasilkan nilai PCR dan DRC lebih kecil dari satu, hal ini menunjukkan bahwa usahatani di kedua tempat memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Ciwidey relatif lebih memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif untuk menghasilkan cabe merah dibanding Lembang.
3. Dampak kebijakan output terhadap usahatani cabe merah menyebabkan usahatani di kedua tempat menerima harga aktual output lebih kecil dari harga sosialnya. Dengan demikian, usahatani cabe merah di kedua tempat tidak mendapat perlindungan dari pemerintah, sehingga terjadi pengurangan penerimaan petani akibat adanya kebijakan terhadap output tersebut.

4. Hasil analisis dampak kebijakan terhadap input menunjukkan bahwa pemerintah memberikan subsidi atas input asing (*tradable*) dan input domestik (*non tradable*), sehingga petani menerima harga input tersebut lebih murah dari yang seharusnya dibayarkan jika tanpa adanya kebijakan. Artinya dengan adanya kebijakan input, usahatani cabe merah di kedua tempat secara tidak langsung menerima subsidi atas input tersebut. Usahatani cabe merah di Lembang menerima insentif lebih besar dibandingkan Ciwidey. Artinya dengan kebijakan terhadap input yang ada sekarang, usahatani cabe merah di Lembang relatif lebih diuntungkan.
5. Hasil analisis dampak kebijakan input-output secara keseluruhan menunjukkan bahwa kebijakan terhadap input-output yang ada sekarang hanya mampu meningkatkan keuntungan petani cabe merah di Lembang sebesar dua persen dari keuntungan yang seharusnya diterima jika tanpa adanya kebijakan. Sedangkan untuk usahatani cabe merah di Ciwidey, kebijakan pemerintah terhadap input-output yang ada sekarang justru berpengaruh negatif terhadap struktur biaya, karena biaya yang diinvestasikan lebih besar dari nilai tambah keuntungan yang dapat diterima. Secara umum kebijakan pemerintah terhadap input-output lebih menguntungkan usahatani cabe merah di Lembang.
6. Hasil analisis perubahan kebijakan menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan biaya produksi, penurunan harga output dan penurunan produksi yang dilakukan baik secara parsial maupun secara bersamaan, menyebabkan tingkat keuntungan yang semakin kecil dan nilai

PCR dan DRC yang semakin besar mendekati satu. Namun, perubahan tersebut tidak sampai mengubah keuntungan menjadi negatif (rugi) maupun mengubah keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif menjadi tidak berdaya saing. Dengan demikian, walaupun terjadi peningkatan biaya produksi, penurunan harga output dan penurunan produksi baik secara parsial atau secara bersamaan, usahatani di kedua tempat tetap layak untuk dikembangkan. Dengan demikian secara keseluruhan, kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat tidak mengakibatkan penurunan daya saing komoditi cabe merah di kedua lokasi tersebut.

#### IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Untuk meningkatkan keuntungan usahatani di Ciwidey, diperlukan peningkatan produktivitas dan harga yang diterima petani. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Bandung perlu melakukan pembenahan sistem pemasaran dan distribusi input khususnya pupuk dan obat-obatan, kemudian untuk mendukung efisiensi pemasaran input maupun output, diperlukan peningkatan aksesibilitas daerah melalui pembangunan sarana jalan dan fasilitas pemasaran yang memadai.
2. Meskipun secara finansial usahatani cabe merah di Lembang lebih menguntungkan, Lembang memiliki kompetensi dasar di sektor pariwisata dan perdagangan. Implikasinya, dalam rangka meningkatkan produksi cabe merah, Kabupaten Bandung Barat perlu mendorong pengembangan daerah sentra baru. Hal tersebut dapat dilakukan mengingat masih banyak tersedia lahan potensial yang belum



- termanfaatkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, maka perlu peningkatan efisiensi disertai peningkatan produktivitas dan pemanfaatan hasil. Untuk itu perlu iklim usaha yang kondusif dengan cara penyediaan fasilitas kredit usaha (agar petani tidak menggantungkan modalnya dari hasil panen), pelayanan teknis seperti standarisasi produk dan informasi pasar dan mendorong pengembangan kemitraan usaha antara petani dengan industri pengolahan
  4. Dari simulasi kebijakan, menunjukkan bahwa usahatani cabe merah rentan terhadap perubahan harga input, harga output dan perubahan produksi baik secara parsial maupun secara bersamaan. Implikasinya adalah (1) diperlukan evaluasi dan pengawasan sistem distribusi dan pemasaran input terutama pupuk dan obat-obatan untuk mencegah kelangkaan dan mahalnya input tersebut ketika musim tanam; (2) untuk menekan tingginya fluktuasi harga diperlukan strategi antara lain, pembangunan infrastruktur untuk memperlancar distribusi dan pemasaran, upaya penanganan pasca panen dan pengaturan pergiliran tanaman agar tidak terjadi panen serentak di semua wilayah sentra produksi, sehingga dapat menjamin kontinuitas produksi. Disamping itu, diperlukan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan sub terminal agribisnis sampai tingkat kecamatan disertai dengan pelatihan dan standarisasi mutu produk. (3) Untuk menekan fluktuasi produksi cabe merah, diperlukan langkah strategis antara lain, pemberian pelatihan kepada petani tentang inovasi teknik budidaya seperti

bimbingan teknis penerapan benih unggul dan pemupukan berimbang, penanggulangan hama dan penyakit. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian. Oleh karena pemekaran wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat tidak menurunkan daya saing komoditi cabe merah di kedua lokasi, maka kedua lokasi ini dapat melanjutkan programnya untuk mengembangkan hortikultura khususnya cabe merah di masing-masing kabupaten secara terpisah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A, Armen Z, Syahyuti, Herlina T, Ade S, Yana S dan Tjetjep N. 2005. *Laporan Akhir "Analisis Berbagai Bentuk Kelembagaan Pemasaran dan Dampaknya Terhadap Kinerja Usaha Komoditas Sayuran dan Buah"*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Adi, W. 2006. *Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Propinsi Di Indonesia Dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP), XIV (1) 2006*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Deptan. Jakarta.
- Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005-2010*. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung 2005*. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung 2006*. Bandung.

- . 2006. *Rencana Strategis Pembangunan Pertanian Kabupaten Bandung*. Kerjasama Puslit Kebijakan Pertanian dan Agribisnis Universitas Padjadjaran dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Bandung.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Propinsi Jawa Barat. 2007. *Petunjuk Pasar Sayur Mayur dan Buah-buahan di Asia dan Afrika*. Bandung.
- Latief, A. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintah Daerah*. UII Press Jogjakarta. Yogyakarta.
- Mayrowani, H. 2006. *Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Perdagangan Hasil Pertanian dalam Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4 No 3 September 2006*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Monke, E. A dan S.R. Pearson. 1989. *The Policy Analysis Matrix For Agricultural Development*. Cornell University Press: Itacha and London.
- Novianti, T. 2003. *Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Saing Komoditas Unggulan Sayuran*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Pearson, S, Carl Gotsch dan Sjaiful Bahri. 2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciwidey. 2007. *Data Monografi Kecamatan Ciwidey*. Bandung.
- Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Lembang. 2007. *Data Monografi Kecamatan Lembang*. Bandung.
- Pusat Data dan Informasi Dirjen Hortikultura. 2008. *Volume dan Nilai Ekspor-Impor Komoditas Sayuran di Indonesia*. Jakarta.
- Rusono, N. 1999. *Analisis Daya saing Beberapa Komoditi Tanaman Pangan Pada Beberapa Lokasi Pengembangan*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rosfaulina. 2000 *Analisis Pendapatan Usahatani Cabe Merah keriting di Tiga Desa di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Salman, M. 1993. *Analisis Ekonomi Komoditas Kapas Indonesia: Pendekatan Simulasi Kebijakan Dengan Model Ekonometrika*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Salvatore, D. 1997. *Ekonomi Internasional*. Erlangga. Jakarta.
- Saragih, B. 2001. *Analisis Pendapatan Usahatani Cabe Merah Keriting (studi kasus di desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Simanungkalit, J. 2003. *Analisis Tipologi Daya saing Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Simanupang, P. 2003. *Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan dalam Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Volume 1 Nomor 1, maret 2003*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Deptan. Jakarta.
- Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.